

Parlementaria

Volume 10 Nomor 10 Desember 2018 • Rp12.000



KMP Lestari Maju Tak Alami Kebocoran



PTBA Miliki Cadangan Batu Bara Selama 150 Tahun



Foto: Titara/hr

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir didampingi Tim Kunker Komisi V DPR RI memberikan keterangan pers terkait tenggelamnya KMP Lestari Maju

KMP Lestari Maju Tak Alami Kebocoran

Komisi V DPR RI menemukan fakta baru terkait tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Lestari Maju yang kandas di perairan Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, awal Juli lalu. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir mengungkapkan, KMP Lestari Maju tidak mengalami kebocoran dari bawah kapal, melainkan adanya pelanggaran terkait penggunaan kapal *Landing Craft Tank* (LCT) yang digunakan menjadi kapal angkutan orang.

“Tidak benar informasinya jika kapal mengalami kebocoran. Konstruksi kapal jenis LCT ini oleh Kementerian Perhubungan jelas dilarang untuk digunakan menjadi kapal angkutan orang, larangannya pun sudah sejak lama. Ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan,” ungkap Ibnu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau lokasi kecelakaan KM Lestari Maju, di lepas Pantai Pabbandilan, Desa Bungaya, Kecamatan Bontomanai, Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/7).



Politisi Partai Golkar itu pun mempertanyakan izin yang dikeluarkan, sehingga kapal tersebut digunakan menjadi kapal angkutan penumpang. “Karena konstruksi kapal LCT itu memang berbahaya, bagian bawah kapalnya terbuka, jika ada ombak besar air pasti masuk ke dalam kapal. Dengan adanya air yang masuk menggenangi lambung kapal, membuat kapal menjadi tidak stabil. Itulah yang menyebabkan kapal tenggelam,” jelas Ibnu.

Untuk itu, Ibnu menekankan perlu ada penyelidikan mendalam dan sanksi yang tegas terkait dengan pihak-pihak yang andil dalam kasus kecelakaan kapal agar ke depan kecelakaan kapal yang memakan korban jiwa tidak kembali terulang.

“Apapun kejadiannya, menggunakan kapal LCT sebagai kapal angkutan penumpang saja sudah merupakan suatu hal yang salah. Kenapa tetap diizinkan untuk melaut, ini yang harus benar-benar diselidiki,” tegas politisi dapil Sulawesi Barat itu.

Di sisi lain, Ibnu berharap pemerintah melalui PT. ASDP dapat menyediakan kapal tambahan, agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di Pulau Selayar. “Karena jika nantinya inflasi tinggi di Selayar, hal ini akan memberikan kontribusi terhadap inflasi nasional. ASDP kan banyak membangun kapal, lebih bagus jika kapal tersebut dapat diarahkan ke Pelabuhan Pamatata dan Bira di Kabupaten Selayar ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta Kemenhub untuk segera menurunkan personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk segera menyelidiki kasus kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Lestari Maju. Pasalnya menurut Bambang, pelibatan Polisi di dalam penanganan tersangka dinilai terlalu cepat dan dapat meresahkan dunia transportasi khususnya pelayaran.

“Kemenhub harus segera menurunkan personel PPNS tentunya bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyelidiki kasus kecelakaan ini. Apa yang dilakukan oleh Polri dalam menahan nahkoda dan syahbandar ini terlalu cepat, karena Polri baru dapat bertindak jika terdapat unsur tindak pidana,” tegas Bambang.

Politisi Partai Gerindra itu menilai, apa yang dilakukan oleh Nahkoda Kapal

dalam menyelamatkan penumpang sudah sesuai standarisasi Safety of Life at Sea (SOLAS). Hal itu terbukti dari video yang beredar, keseluruhan penumpang yang menyelamatkan diri seluruhnya sudah menggunakan life jacket.

“Selain itu juga langkah yang dilakukan oleh nahkoda yakni dengan cara mengandaskan kapal sudah tepat, hal tersebut dilakukan agar kapal tidak tenggelam dan dapat menimbulkan lebih banyak korban. Jadi artinya SOLAS sudah dilaksanakan dengan baik,” tandasnya.

Maka dari itu, Bambang berharap ada evaluasi lebih lanjut terhadap posisi penetapan tersangka oleh Polri. Mengingat ada atau tidaknya unsur tindak pidana belum diputuskan oleh pihak PPNS.

“Karena dalam urusan transportasi adalah tugas daripada Mahkamah Pelayaran, jadi bukan Mahkamah Hakim di umum. Mahkamah Pelayaran ini sangat *lex specialis* jadi tidak bisa diberikan kepada hakim umum atau pengadilan umum,” imbuh politisi dapil Jatim itu.

Sebagaimana diketahui, KMP Lestari Maju karam pada Selasa (03/7) lalu dan mengakibatkan 35 jiwa tewas, satu orang hilang serta 155 selamat. Kapal diduga mengalami kebocoran pada lambung, namun belum didapat keterangan jelas mengenai penyebab kebocoran lambung kapal. Puluhan kendaraan masih berada di bangkai kapal. Proses pencarian terhadap korban yang hilang telah dihentikan karena telah melebihi tujuh hari.

Imbas dari tenggelamnya KMP Lestari Maju itu, Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tenggelamnya KMP Lestari Maju di Perairan Kepulauan Selayar pada Selasa (03/7). Ketiga orang tersebut adalah Nahkoda Kapal Agus Susanto, pihak Syahbandar Bira Kuat Maryanto, dan pemilik kapal Hendra Yuwono.

Kunjungan Kerja ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, diantaranya Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan), Hamka B. Kady (F-PG), Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), Sungkono (F-PAN), Irmawan, Unais Ali Hisyam, Abdul Latief Hanafiah (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PPS), Abubakar Wasahua (F-PPP), dan Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem). ■ tra/sc



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Gerald Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menunjukkan Sampul Hari Pertama (SHP) sesuai ditandatangani di Gedung DPR

Foto: Jayadi/hr

Orari Jadi Alternatif Komunikasi dan Informasi

Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) ternyata memberi peran positif bagi Bangsa Indonesia. Sejak berdirinya 50 tahun lalu, Orari telah memberi alternatif informasi dan komunikasi yang berbeda bagi masyarakat di tengah serbuan teknologi komunikasi saat ini.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan hal itu saat memberi sambutan pada peringatan 50 tahun Orari di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/7). Dalam acara ini, juga dilakukan penandatanganan Sampul Hari Pertama (SHP) dan peluncuran Prangko Peringatan 50 Tahun Orari.

“Orari masih ada dan saya memahami betul. Perkembangannya sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Kiprahnya luar biasa membantu kesulitan bangsa. Orari menempatkan diri sebagai cadangan nasional di bidang komunikasi,” ucap Bamsuet, sapaan akrabnya, dalam sambutannya.

Tidak hanya itu, Orari juga menyajikan informasi yang lebih akurat di tengah begitu banyak informasi hoaks. Bahkan, Orari menjadi alternatif komunikasi bagi masyarakat di ujung negeri yang kesulitan berkomunikasi lewat telepon seluler. Menurut

Bamsuet, yang sangat membanggakan dari perkembangan Orari saat ini adalah adanya satelit sendiri untuk menunjang operasionalnya hasil kerja sama dengan Lapan.

Satelit A2 itu merupakan karya anak bangsa yang dapat berfungsi dengan baik di udara. Dengan begitu jangkauan siarannya akan lebih luas. Pada bagian lain, Bamsuet juga mengapresiasi, peran Orari yang mempersatukan wilayah Indonesia. Di tapal batas, Orari mampu memunculkan sinyal frekuensinya di tengah klaim negara tetangga.

Sementara itu, pada acara ulang tahun Orari ke-50 itu, Bamsuet dinobatkan sebagai anggota kehormatan Orari sekaligus menandatangani perangko 50 tahun Orari. Kini, Orari sudah memiliki lebih 50 ribu anggota di seluruh Indonesia. Acara ini merupakan kali pertama Orari merayakan ulang tahunnya di Gedung DPR RI. ■ mh/sf

“ Kita sangat prihatin dengan kecelakaan angkutan laut yang beruntun ini. Belum selesai dengan kesedihan kita akan tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, lalu tenggelamnya Speed Boat pengangkut TKI di Nunukan, dan KM Lestari Maju di Sulawesi Selatan. Kita mendorong Basarnas dan pihak terkait lainnya untuk bekerja ekstra menyelamatkan korban,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (04/7).

Taufik menambahkan, jika peralatan Basarnas kurang memadai untuk pencarian korban karena kedalaman laut, ia mendorong untuk berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki peralatan mumpuni. Menurutnya, dengan kondisi perairan laut dan cuaca yang terkadang kurang bersahabat, bantuan dari pihak lain yang berkompeten, diharapkan dapat membantu penyelamatan korban.

Di sisi lain, dengan kejadian tenggelamnya kapal motor yang terjadi secara beruntun ini, perlu ada evaluasi secara menyeluruh dari angkutan perairan maupun laut. Kementerian Perhubungan, maupun dinas terkait, harus memastikan kelaikan kapal untuk beroperasi. Kapal angkutan penumpang

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memperbaiki kinerja dan melaksanakan kaidah *good corporate governance*. Memang BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan, tapi tidak bisa dikelola seperti perusahaan swasta, karena adanya misi khusus. Karena itu, Menteri BUMN harus mengoreksi diri dan memperbaiki, agar pengelolaan BUMN tidak seperti sekarang.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (05/7) menjawab pertanyaan awak media berkaitan dengan buntutnya negosiasi pilot Garuda Indonesia dengan manajemen, sehingga mengancam akan melakukan aksi mogok.

Menurut Pimpinan Dewan dari Fraksi Demokrat ini, tanpa perbaikan kinerja, PT. Garuda Indonesia mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Dalam kaitan ini, Komisi V DPR RI dan Komisi VI DPR

Taufik Kurniawan Minta Basarnas Kerja Ekstra Selamatkan Korban KMP Lestari Maju

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku prihatin atas tragedi beruntun yang terjadi pada angkutan laut. Yang terakhir, Kapal Motor (KM) Lestari Maju yang tenggelam di perairan Sulawesi Selatan. Taufik mendorong Basarnas untuk bekerja ekstra untuk menemukan dan menyelamatkan korban dari kapal dengan rute Bira-Pamatata itu. Pasalnya, hingga berita ini diturunkan, korban meninggal telah mencapai 35 orang.



Foto: Jaka/hr

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

dan kemungkinan masih akan terus bertambah seiring masih dilakukannya penapisiran di sekitar lokasi kecelakaan. ■ es/sf

harus memiliki surat izin untuk berlayar. Selain itu, cuaca yang kurang bersahabat, juga harus menjadi perhatian bagi kapal untuk berlayar.

“Terkadang, pemilik kapal tidak peduli dengan keadaan kapal yang tidak laik serta cuaca yang kurang bersahabat, sehingga memaksakan kapal untuk berlayar. Bahkan surat izin berlayar pun kerap diabaikan. Jumlah penumpang juga terkadang melebihi jumlah seharusnya yang diangkut. Pengawasan dari Kemenhub harus ditingkatkan,” pesan politisi PAN itu.

Hingga berita ini diturunkan, korban meninggal dalam tragedi kandasnya KM Lestari Maju di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, mencapai 33 orang. Humas Kantor SAR Makassar menyatakan Tim gabungan Polisi dan Basarnas dibantu nelayan saat ini masih terus menyisir sekitar lokasi kecelakaan untuk mencari korban lainnya.

KM Lestari Maju mengangkut 164 orang yang terdaftar sebagai penumpang, termasuk kru kapal. Selain itu, ada lebih dari 20 orang yang identitasnya tidak tercatat alias ‘no name’ (tanpa identitas),

BUMN Diminta Perbaiki Kinerja

RI sudah membahas secara detil dengan Kementerian BUMN, tapi hambatannya Menteri BUMN Rini Suwandi belum bisa hadir di DPR RI, akibat adanya surat peringatan dari Pansus Pelindo.

Untuk itu, sekali lagi Agus mewanti-wanti agar Kementerian BUMN harus memperbaiki diri dan memberi rasa aman pada jajaran perusahaan negara tersebut. Diakui, selama ini ada hambatan aturan, yang mengakibatkan Menteri BUMN belum bisa datang ke DPR. Sehingga hal ini diserahkan kepada Presiden agar BUMN ini berjalan dalam rangka mewujudkan *good corporate governance* tersebut.

“Kita harus mencari solusi, kalau begini terus *enggak* akan bisa ketemu. Dan perbaikan BUMN selamanya tidak akan terjadi. Harus bertemu langsung dengan Menteri, kalau diwakilkan harus bisa mengimplementasikan *good corporate governance*,” pungkas Agus.

Hal ini pun ia kaitkan dengan kasus karamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, dan KM Lestari Maju di Selayar, Sulawesi Selatan,



Foto: Jaka/hr

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

dengan korban jiwa yang cukup banyak. Agus menyatakan prihatin atas tragedi ini.

“Ke depan tidak boleh ada kejadian yang memilukan seperti ini lagi. Dunia pelayaran Indonesia harus lebih baik lagi. Mungkin ada hambatan cuaca atau faktor lain, tapi dengan peralatan-peralatan yang canggih dan modern, harus memberi rasa aman kepada penumpang kapal,” dorong Agus.

Pimpinan DPR Korinbang ini mendesak dilakukannya pembenahan manajemen Angkutan Sungai, Dana dan Penyeberangan (ASDP) yang juga merupakan BUMN. Kepada BUMN banyak hal yang harus dibenahi karena ditengarai banyak BUMN yang tidak nyaman dengan Kementerian BUMN sekarang ini. ■ mp/sf

DPR Setujui RUU Kekarantinaan Kesehatan Menjadi UU

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU). Setelah melalui pembahasan yang cukup lama di Badan Legislasi (Baleg), RUU ini telah disetujui oleh fraksi-fraksi dalam Rapat Pleno Baleg pada 3 Juli 2018 lalu, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Persetujuan ini diambil setelah seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7) menyatakan persetujuannya. Dalam rapat itu Agus menanyakan, “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” yang kemudian serentak dijawab “setuju” oleh Anggota Dewan, yang diiringi pengetukan palu pimpinan sidang menjadi tanda pengesahan.

Sebelumnya Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Sarmuji menyampaikan laporan kepada para Anggota Dewan tentang hasil pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dia menyampaikan, penyusunan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan yang baru ini, dimaksudkan

untuk mengganti UU Keekarantinaan Kesehatan yang lalu, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

Politisi Partai Golkar itu juga memaparkan, permasalahan kesehatan di Indonesia ke depan akan semakin kompleks dan beragam. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkewajiban melakukan upaya pencegahan terjadinya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) sebagaimana yang diamanatkan dalam International Health Regulations (IHR) 2005.

“Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia dan dasar-dasar kebebasan seseorang serta

penerapannya secara universal,” imbuh Sarmuji.

RUU ini, lanjut Sarmuji, juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat dunia yang terjadi di pintu masuk dan wilayah. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu disusun UU tentang Keekarantinaan Kesehatan yang komprehensif, integratif, dan efektif, mengingat UU sebelumnya sudah tidak dapat menampung semua materi permasalahan saat ini.

Atas persetujuan DPR RI itu, Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas selesainya pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang telah dibahas oleh DPR RI dengan pemerintah.

“Selesainya rancangan undang-undang ini berkat kerja sama yang sangat baik antara pemerintah dengan dewan, baik di tingkat Badan Legislasi tingkat Panitia Kerja Badan Legislasi, maupun pembahasan di tim perumus dan tim sinkronisasi,” kata Nila. ■ eko/sf



Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Sarmuji menyampaikan hasil perubahan RUU kepada pimpinan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Foto: Azka/hr



RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Korsel Disetujui Menjadi UU

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang. RUU ini merupakan tindak lanjut kesepakatan kerja sama bidang pertahanan antara RI dengan Korsel pada 12 Oktober 2013 lalu.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto sebelum mengetuk palu persetujuan, menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

“Apakah RUU tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan ini dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” tanya Agus. Jawaban ‘setuju’ pun didengungkan oleh Anggota Dewan, dengan diiringi ketukan palu persetujuan.

Sebelumnya, pada laporan di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyampaikan bahwa seluruh pihak berharap, kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

“Bahwa dengan disahkannya persetujuan ini menjadi undang-undang, keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi

dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi,” jelasnya dengan lugas.

Kemudian sebelum mengakhiri pidatonya, Asril tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang secara kooperatif dan bersungguh-sungguh dalam membahas RUU ini.

Selain itu, ketika diwawancara usai Rapat Paripurna, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa dengan adanya pengesahan ini maka nantinya akan ada payung hukum terhadap kerja sama kedua negara.

“UU ini menjadi pedoman strategis bagi MoU kedua negara di berbagai bidang pertahanan. Acuanannya adalah UU ini. Di situ disepakati harus membuat komite bersama antar dua negara. Nah, komite bersama ini yang kemudian akan melakukan implementasi,” imbuh Asril.■

eps/ff



Foto : Jaka/hr

Pimpinan DPR RI menerima RUU tentang kerja sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah RI dengan Korea Selatan dari Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah



Tim Kunker Komisi III DPR RI mengunjungi Polda Metro Jaya

Foto: Oji/hr

Komisi III Bahas Pengamanan Asian Games dengan Polda Metro Jaya

Komisi III DPR RI mengunjungi Polda Metro Jaya untuk mengetahui bagaimana persiapan dan strategi pengamanan menghadapi event internasional Asian Games 2018 yang akan dibuka pada 18 Agustus mendatang.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir saat menggelar pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya dan jajarannya serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (09/7).

“Kami meminta penjelasan kepada Kapolda Metro Jaya secara komprehensif mengenai berbagai persiapan, kebijakan pengamanan, dan kendala yang dihadapi,” imbuh Kahar, saat memimpin pertemuan.

Politisi Partai Golkar ini juga menekankan perlunya berbagai operasi

cipta kondisi sejak dini untuk menekan potensi gangguan keamanan jelang perhelatan akbar Asian Games di Ibu Kota Jakarta.

“Maraknya kasus jambret di Jakarta beberapa waktu lalu perlu direspon secara serius, agar tidak mencoreng citra keamanan Ibu Kota selaku tuan rumah Asian Games,” pinta legislator asal Dapil Sumatera Selatan I.

Menanggapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengatakan bahwa keamanan dan ketertiban di wilayah Polda Metro Jaya menjelang event Asian Games

harus terjaga dengan baik dan menjadi fokus utama jajarannya.

“Sejak 4 Juli sudah dilakukan operasi cipta kondisi dan diamankan 387 pelaku kriminal seperti preman, jambret, begal dan lain-lain. Ini salah satu upaya serius kami mengamankan ibu kota,” jelas Kapolda Metro Jaya dalam paparannya.

Sementara terkait kelancaran lalu lintas, pihaknya juga tengah gencar melakukan sosialisasi penerapan ganjil-genap yang diperluas wilayahnya dan diperpanjang masa berlakunya.

“Untuk itu kami juga memohon pengertian masyarakat atas ketidaknyamanan terkait kebijakan ganjil-genap demi kesuksesan event Asian Games,” pungkas Kapolda.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa, serta sejumlah Anggota Komisi III DPR RI diantaranya Masinton Pasaribu, Risa Mariska, Adies Kadir, Bambang Heri Purnama, Muhammad Syafei, Hince I.P Panjaitan, Muslim Ayub, Mohammad Toha, Aboe Bakar Al Habsy, Aditya Mufti Arifin, Ahmad Sahroni, Sarifuddin Sudding. ■ oji/sf

Komisi V Dukung Peningkatan Jalan Bandara Samratulangi-KEK Likupang

Komisi V DPR RI mendukung upaya peningkatan jalan provinsi di Sulawesi Utara, khususnya ruas Bandara Samratulangi Manado - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang menjadi jalan nasional. Hal ini untuk menjadikan kawasan-kawasan pariwisata unggulan di KEK Likupang menjadi destinasi wisata yang produktif, dengan tingkat pelayanan yang memadai.

PUPR Rahmad Arif mengatakan, usulan yang disampaikan Pemprov Sulut ke pemerintah pusat terkait akses dari Bandara Samratulangi ke KEK Likupang saat ini sedang dilihat, untuk memastikan potensi wisata di sana berjangka panjang.

“Kami sedang melihat secara seksama apakah status jalan tersebut jika kita tingkatkan akan berpotensi besar sebagai kawasan wisata nasional nantinya. Apakah juga layak untuk ditingkatkan menjadi jalan nasional,” ungkap Rahmad.

Ia menambahkan, usulan itu akan dibahas dan dibicarakan terlebih dahulu, dan untuk dananya akan diputuskan. Namun yang paling utama dari usulan ini adalah pihaknya mendapatkan informasi terkait pengembangan kawasan di KEK Likupang ini.

“Komisi V melihat langsung kawasan Likupang yang menjadi objek wisata, salah satunya Pantai Pal. Saya lihat pantai di sini cukup bagus, dan masih sangat alami. Untuk itu, kami akan mendukung dan membantu mengupayakan jalan tersebut menjadi jalan strategis nasional,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI saat meninjau ke Pantai Pal di kawasan Likupang, Desa Marinsu, Sulawesi Utara, Rabu (11/7).

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, peningkatan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional untuk menunjang akses pariwisata di KEK Likupang perlu didorong secara bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal itu guna mendukung kawasan Likupang menjadi kawasan pariwisata nasional.

“Namun tidak hanya akses jalan saja yang diperlukan, namun peningkatan layanan juga, seperti ketersediaan air bersih. Untuk itu, diperlukan inventarisir kebutuhan dari masing-masing sub sektor, sebagai kebutuhan peningkatan pelayanan bagi destinasi pariwisata tersebut.

Lebih lanjut Lasarus menambahkan, pihaknya hadir ke Likupang ini dengan mengajak sejumlah mitra kerja, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan untuk bersama-sama melihat langsung kawasan jalan tersebut dari aspek yuridisnya dan teknis, sehingga menghasilkan keputusan yang baik untuk peningkatan jalan di kawasan tersebut

menjadi jalan nasional.

“Kemudian hasil dari peninjauan ini akan kita bawa ke rapat di DPR, untuk membicarakan prospek selanjutnya. Termasuk juga dari segi anggaran, bisa disiapkan pada tahun ini, atau kita tetapkan pada anggaran tahun 2019,” kata politisi wakil Kalbar itu.

Di tempat yang sama, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian



Tim Kunker Komisi V DPR RI tinjau ke Parawisata Likupang

Foto: Rumi/hr

Tidak hanya akses jalan saja yang diperlukan, namun peningkatan layanan juga, seperti ketersediaan air bersih. Untuk itu, diperlukan inventarisir kebutuhan dari masing-masing sub sektor

“Bina Marga saya rasa bisa melihat dari potensi wisata di kawasan ini. Berapa besar kira-kira kunjungan wisatawan yang berkunjung, seperti turis-turis dari China. Misalnya ada 100 ribu wisatawan yang berkunjung, bisa dilihat dari jumlah kendaraan. Ada berapa puluh persen menggunakan bus, kendaraan pribadi ataupun kendaraan roda dua,” jelas Rahmad.

■ rmi/sf



Tim Kunker Komisi V DPR RI menggali informasi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba

KM Sinar Bangun Tenggelam Karena *Human Error*

Tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba pada pertengahan Juni 2018 lalu, menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Pasalnya, insiden itu telah mengakibatkan lebih dari 160 penumpang dinyatakan hilang. Dari berbagai data yang didapatkan, maupun melihat langsung kondisi di Danau Toba, Komisi V DPR RI menilai kapal ini tenggelam akibat *human error*.



Demikian diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Danau Toba, Sumatera Utara, Rabu (11/7). Selama kunjungan kerja dalam rangka menggali informasi mengenai tenggelamnya KM Sinar Bangun itu, Komisi V DPR RI didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan, perwakilan Basarnas, dan perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Kecelakaan ini karena adanya *human error*, karena tidak ada ombak di Danau Toba. Ombak di Danau Toba itu tidak sampai tiga meter. Dengan adanya insiden ini, kami melihat Kementerian Perhubungan sudah melakukan langkah konkret, sehingga menjadi cambuk kepada seluruh instansi di bawahnya untuk meningkatkan kinerjanya, terutama Kabupaten Samosir,” kata Anthon.

Politisi Partai Golkar itu berharap, Pemerintah Kabupaten Samosir maupun pemda-pemda lainnya yang berada di wilayah Danau Toba, agar mendorong para pengusaha kapal untuk mengikuti *short course* yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan. Menurutnya, pemda diseluruh wilayah Danau Toba, harus aktif menjemput bola kepada pengusaha kapal yang mengoperasikan kapal di Danau Toba.

“Pemda harus aktif. Ditjen Hubdar sudah membuat langkah konkret. Pemda di sekitar Danau Toba bisa seiya sekata. Jangan karena otonomi, seolah tidak bisa diatur. Karena semua diatur oleh pemerintah pusat. Kabupaten Samosir harus lebih serius. Kapal mereka ada 400, tapi ketika dibuat Diklat, yang datang hanya beberapa orang saja. Mereka harus jemput bola,” tegas politisi dapil Sumut itu.

Dalam kesempatan itu, untuk membuktikan bahwa tidak ada ombak yang tinggi di Danau Toba, Tim Kunker Komisi V DPR RI melakukan pelayaran menyeberangi Danau Toba menggunakan KM Dosroha. Tim Kunker Komisi V DPR RI juga meninjau sejumlah pelabuhan di Danau Toba, diantaranya Pelabuhan Ajibata, Pelabuhan Simanindo, dan Pelabuhan Tigaras. Saat ini, tiga pelabuhan itu sedang dalam tahap pembangunan dermaga.

“Untuk anggaran dialokasikan untuk Pelabuhan Ajibata Rp32 miliar, Pelabuhan Simanindo Rp24 miliar, dan Pelabuhan Tigaras Rp12 miliar. Anggaran untuk keselamatan di danau, laut, dan sungai akan kita dukung sepenuhnya. Kita dorong Basarnas agar ditambah, jangan hanya di Ajibata, tapi di Samosir, dan daerah lainnya di sekitar Danau Toba ini. Itulah keseriusan pemerintah pusat, sehingga pemda juga harus bekerja sama,” tegas Ketua Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia itu.

Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Medan sekaligus Koordinator Tim Pencarian KM Sinar Bangun Budiawan menjelaskan, operasi SAR terhadap KM Sinar Bangun sudah dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 18 Juni sampai

Pemda harus aktif. Ditjen Hubdar sudah membuat langkah konkret. Pemda di sekitar Danau Toba bisa seiya sekata. Jangan karena otonomi, seolah tidak bisa diatur. Karena semua diatur oleh pemerintah pusat. Kabupaten Samosir harus lebih serius. Kapal mereka ada 400, tapi ketika dibuat Diklat, yang datang hanya beberapa orang saja. Mereka harus jemput bola,

dengan 1 Juli 2018.

“Operasi SAR dilaksanakan menggunakan metode pengamatan udara, *searching* permukaan air, *searching* bawah air dengan *scanning* sonar dan robot kamera bawah air (ROV), penyelaman hingga kedalaman 50 meter, penggarukan jangkar, dan penjarangan menggunakan pukat,” jelas Budiawan.

Selama masa pencarian, jumlah korban berkembang hingga 205 orang, seiring pengaduan masyarakat ke Polres Simalungun. Rinciannya 18 orang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 184 orang dalam pencarian. Seluruh pihak terus berupaya mencari korban. Hingga pada hari ke 16 pada 3 Juli 2018, diadakan upacara adat dan keagamaan untuk peletakan batu pertama pembangunan Monumen Peringatan Kecelakaan KM Sinar Bangun di Desa Tigaras.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Angkutan dan Multimoda, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Arif Muljanto menjelaskan, masa berlaku izin operasi KM Sinar Bangun 28 April 2018 sampai dengan 22 April 2019. Seharusnya kapal hanya bisa memuat penumpang 40 orang dan ABK 3 orang.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, diantaranya Firmandez (F-PG), Ade Rezki Pratama (F-Gerindra), Subarna (F-Gerindra), Intan Fitriana Fauzi (F-PAN), Jhoni Alen Marbun (F-Demokrat), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Nurhasan Zaidi (F-PKS), Sahat Silaban (F-Nasdem), dan Soehartono (F-Nasdem). ■ **sf**



Tim Kunker Komisi VII DPR RI berdiskusi dengan LIPI dan pejabat Kebun Raya Purwodadi

Foto: Eko/hr

Legislator Optimis Kebun Raya Purwodadi Tarik Kunjungan Wisatawan

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam optimis Kebun Raya Purwodadi dapat menjadi objek pariwisata baru bagi wisatawan, baik lokal maupun asing. Bahkan harapan ke depannya, setiap daerah bisa memiliki kebun raya sebagai aset utama peningkatan penghasilan daerah.

Hal ini disampaikan saat mengunjungi Kebun Raya dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Purwodadi bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (06/7). Ia melihat saat ini banyak perkembangan yang dilakukan oleh LIPI dan Kebun Raya Purwodadi dalam rangka menuntaskan program pemerintah.

“Bisa kita lihat di Eropa, fungsi kebun raya bukan saja sebagai tempat konservasi keanekaragaman hayati,

melainkan juga sebagai tempat wisata utama para wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Saya yakin jika kita konsisten, beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Bahkan bisa mengalahkan hegemoni dari alun-alun yang selalu jadi objek wisata utama di daerah,” optimis Ridwan.

Politisi Partai Golkar ini menilai, kebun raya memiliki potensi yang sangat tinggi untuk pariwisata. Salah satunya Kebun Raya Purwodadi di Jawa Timur ini, yang letaknya yang strategis di Jalan Malang-Surabaya, membuat kebun ini

layak menjadi destinasi ekowisata yang mampu menarik wisatawan asing maupun lokal.

“Kami harap Kebun Raya Purwodadi ini tidak kalah dengan Kebun Raya Bogor. Apalagi Kebun Raya Purwodadi punya ciri khas, yaitu tanaman anggrek dan bisa jadi ikon tinggal bagaimana mengembangkannya. Karena itu harus ada sinergi agar kebun raya di Pasuruan ini juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang mampu mengangkat pariwisata daerah,” lanjut Ridwan.

Politisi dapil Jatim ini juga menyatakan bahwa dirinya pernah mengajukan anggaran khusus untuk pengembangan yang akan dilakukan oleh LIPI dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk Kebun Raya Purwodadi. Untuk itu, ia siap untuk mengajukan kembali apabila hal ini dibutuhkan ke depannya. ■ eps/sf

Komisi VII Dorong PT. Antam Selesaikan Persoalan Kemitraan

Komisi VII DPR RI terus mendorong agar PT. Aneka Tambang (PT. Antam) segera menyelesaikan persoalan kemitraan antara anak perusahaannya, yaitu Indonesia Chemical Alumina (ICA) dengan investor dari Jepang. Pasalnya, akibat belum adanya hasil negosiasi, kini produksi pabrik smelter bauksit dan alumina dihentikan sementara.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Pabrik Smelter Bauksit/ Alumina PT. Antam di Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (06/7). Menurutnya, pabrik pengolahan bauksit, alumina dan berbagai turunannya itu harus didorong bersama.

“Karena apa, saat ini pabriknya sempat berhenti dan operasional perusahaan hanya mengandalkan ekspor *raw material*. Nah, supaya lebih bernilai tentu kita mendorong supaya Antam segera menyelesaikan persoalan kemitraan dengan pihak perusahaan Jepang yang saat ini *exit* dari perusahaan ini. Dan tentu supaya segera secara hukum bisa selesai, perusahaan bisa beroperasi dan bisa berproduksi,” jelas Herman.

Perihal tidak beroperasi dan berproduksinya pabrik tersebut, menurut politisi Partai Demokrat itu diawali sejak awal memulai perusahaan ini pada tahun 2015, dimana biaya produksi di atas harga jual, sehingga dalam perjalanannya mengalami kerugian. Sementara saat ini pihak Jepang telah keluar dalam kerja sama ini, dan PT. Antam tengah berproses untuk menguasai secara penuh.

“Dalam proses untuk dikuasai sepenuhnya oleh Antam tentu dengan berbagai cara dan strategi perusahaan apakah akan dikuasai sepenuhnya oleh PT. Antam atau akan dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan lain. Utamanya yang menguasai *market* secara dunia,” jelas Herman.

Menurutnya, hal itu menjadi faktor utama dalam kelancaran produksi. Supaya *raw material* yang tersedia sangat besar ini dapat diproduksi, bernilai tambah, dan bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu juga bisa menyumbang kepada negara melalui *dividen*, sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Saya kira ini kita dorong, kita *endorse* ya. Dan bagi Komisi VII



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron

Foto : Nadia/hr

kami mendukung sepenuhnya agar bisa berproduksi kembali,” harap politisi daerah pemilihan Jawa Barat itu.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan bahwa yang menarik berdasarkan pemaparan dari pihak PT. Antam adalah adanya suatu pembelajaran ketika Indonesia melakukan negosiasi dengan para investor, khususnya para investor asing, setidaknya kerja sama tersebut seharusnya sesuai dengan besaran porsinya masing-masing.

“Ketika SDA-nya milik kita, bauksit ini kemudian diolah menjadi butir-butiran aluminium, sahamnya dimiliki Indonesia

Supaya lebih bernilai tentu kita mendorong supaya Antam segera menyelesaikan persoalan kemitraan dengan pihak perusahaan Jepang yang saat ini *exit* dari perusahaan ini

80 persen, dalam hal ini diwakili Antam, dan Jepang sebagai investor memiliki saham 20 persen. Tetapi ternyata hak untuk menjual itu justru terbalik. Jepang selaku pemegang saham 20 persen bisa menjual atau memiliki hak untuk menjual sebesar 70 persen. Kemudian Indonesia yang memiliki saham 80 persen hanya memiliki hak menjual sebesar 30 persen. Ya tentunya ini pihak Antam selama ini pihak BUMN Indonesia ini tentunya merugi,” ungkapnya.

Namun dirinya bersyukur, karena kini sedang ada perbaikan dari hasil kerja sama tersebut. Dimana negosiasi terkait perubahan untuk menjual ini tentunya berdasarkan presentase kepemilikan dengan hak jual sama, yaitu jika hak menjual yang semula pemilik saham 20 persen maka, hak jualnya 20 persen,

Selain itu politisi PAN itu juga mengapresiasi usaha PT. Antam yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pegawainya, meskipun produksi kini tengah dihentikan sementara. ■ ndy/sf



Anggota Komisi VII DPR RI Nazarudin Kiemas

Foto: Eno/hr

PTBA Miliki Cadangan Batu Bara Selama 150 Tahun

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan mendapat informasi, kendati PT. Bukit Asam (PTBA) menargetkan produksi batu bara di 2018 sebesar 25 juta ton, masih ada cadangan batu bara yang cukup untuk 150 tahun lagi.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Nazarudin Kiemas saat memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke PTBA, Palembang, Sumsel, Jumat (06/7). Hadir dalam pertemuan itu, beberapa Direktur dari PTBA, Dirjen PPKL dari KLHK dan juga beberapa Anggota Komisi VII DPR RI.

“Walaupun target mereka sampai 25 juta ton batu bara per tahun, tapi cucu kita, bahkan cicit kita nanti masih kebagian. Karena perkiraan cadangan masih cukup untuk 150 tahun lagi, apalagi kalau ketemu sumber

energi baru lainnya, itu mungkin bisa lebih panjang lagi,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan itu, Nazarudin juga menyinggung mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PTBA. Menurutnya, belum ada keluhan dari masyarakat.

“Sampai hari ini belum ada keluhan dari masyarakat mengenai CSR dan dampak lingkungan dari PTBA, karena realisasi CSR dari mereka cukup tinggi untuk kemitraan, bina

wilayah, pemberdayaan masyarakat dan beasiswa, begitu juga dengan pengelolaan lingkungan mereka sangat baik,” ujar politisi dapil Sumsel itu.

Sebelumnya, Direktur Produksi PTBA Suryo Eko mengatakan, target produksi sebesar 25,53 juta ton tersebut naik dari target tahun lalu yaitu sebesar 24,06 juta ton. Dalam rangka memenuhi target tersebut, PTBA sudah bekerjasama dengan PT. KAI untuk mengangkut batu bara sampai dengan tahun 2021.

PTBA juga menjadi perusahaan batu bara yang mendapatkan proper emas berturut-turut dari periode 2013 sampai dengan 2017, berupa penghargaan dan prestasi CSR dan pengelolaan lingkungan. Prestasi itupun mendapat apresiasi dari Komisi VII DPR RI. ■ eno/sf



KPPU Perlu Sosialisasikan Program Ke Masyarakat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait tugas dan fungsi lembaga itu sendiri. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir, karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga ini harus mendapat dukungan dari masyarakat.



Foto: Andri/hr

Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir

Diketahui, KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999, serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya. ■ es/sf

“Memang sosialisasi tentang jati diri KPPU penting sekali. Masyarakat sendiri masih banyak tidak tahu kalau KPPU itu ada, padahal kita sendiri membutuhkan masyarakat guna mendapatkan dukungan dalam menjalankan program kerja,” kata Nyat Kadir saat rapat dengar pendapat dengan KPPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/7).

Dalam rapat ini, terungkap bahwa pada tahun lalu, KPPU menganggarkan dana sosialisasi sebesar Rp3 miliar. Untuk anggaran tahun mendatang, KPPU mengajukan tambahan kenaikan anggaran sosialisasi sebesar Rp7,4 miliar.

“Saya kira KPPU memang perlu penambahan anggaran sosialisasi, karena faktor kedekatan dengan tokoh masyarakat,

tokoh pemuda serta masyarakat luas akan sangat membantu saat menginvestigasi pengusaha-pengusaha nakal,” terang politisi Partai NasDem ini.

Nyat Kadir menambahkan sosialisasi sebaiknya langsung ditujukan ke tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya bukan ke pengusaha. Karena pengusaha-pengusaha tertentu akan mengelak saat mendapat undangan dari KPPU.

Mereka, lanjut politisi dapil Kepri itu, merasa kehadiran KPPU bisa mengganggu kelangsungan usaha mereka. Padahal sejatinya KPPU hadir untuk menyeimbangkan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Harus Bantu Nelayan Korban Kapal Terbakar di Bali

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai pemerintah harus mendorong pihak asuransi membayar ganti rugi kapal nelayan yang terbakar di Pelabuhan Benoa, Bali, Senin (09/7) kemarin. Kendati pihak asuransi harus terlebih dahulu mendapat kepastian apakah kebakaran tersebut disengaja atau tidak, namun ia menilai pemerintah tetap harus membantu nelayan pemilik kapal yang terbakar tersebut.



Foto: Jaka/jk

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro

memang sejak lama ditentang atau diprotes mayoritas nelayan Indonesia. ■ ayu/sf

“Bagaimana caranya agar nelayan yang kapalnya terbakar itu tetap bisa mendapat ganti rugi. Bisa dengan mendorong pihak asuransi membayar ganti rugi kapal yang terbakar atau dengan memberikan pinjaman kredit untuk pembelian kapal baru. Intinya pemerintah tetap harus membantu nelayan yang notabene merupakan masyarakat miskin,” ujar Darori, sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Ditambahkannya, dari sekitar 40 kapal nelayan yang terbakar itu, konon

hanya 15 kapal yang aktif melaut. Sisanya merupakan kapal yang ‘terpaksa’ disandarkan, alias tidak melaut akibat adanya peraturan pelarangan penggunaan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu yang lalu.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah selain harus membantu nelayan mendapatkan ganti rugi dari asuransi atau memberikan pinjaman kredit bagi nelayan, juga harus meninjau ulang peraturan pelarangan penggunaan cantrang atau pukat harimau yang



Suasana pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Delegasi Kementerian Agama Uzbekistan

Komisi VIII Terima Kunjungan Kemenag Uzbekistan

Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Sodik Mudjahid menerima kunjungan delegasi dari Kementerian Agama Uzbekistan dipimpin Dilshod Babadjanov, dengan didampingi Dubes Uzbekistan untuk Indonesia Ulugbek Rozukulov di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (09/7).

Dalam pertemuan ini, dibahas soal kerukunan beragama di masing-masing negara yang memiliki dinamika tertentu. Apalagi negara Uzbekistan pernah lama dijajah oleh Uni Soviet. Dalam kesempatan ini juga dibahas tentang peranan wanita, pendidikan dan turisme Islam (moslem tourism).

“Itu antara lain yang didiskusikan dan tukar pengalaman Komisi VIII DPR dengan Delegasi Kementerian Agama Uzbekistan,”

ungkap Sodik usai pertemuan yang juga dihadiri sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI.

Lebih lanjut politisi dari Fraksi Gerindra ini menjelaskan, dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan ini juga dijajaki untuk melakukan kerja sama pemberdayaan perempuan, karena negara pecahan Uni Soviet itu memiliki dinamika tersendiri.

Kepada Komisi VIII DPR RI, Delegasi dari Uzbekistan menawarkan kerja sama

bidang pendidikan baik umum maupun Iptek. Sebab Uzbekistan memiliki tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Kalau mengunjungi Uzbekistan tidak hanya menemukan museum-museum sejarah Islam, tapi juga banyak museum penemu ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Ini bagus, Komisi VIII DPR RI akan menyampaikan kepada Kementerian Agama agar doktor-doktor untuk pengajar di UIN, bukan hanya ke Timur Tengah atau Eropa dan Amerika, tapi juga ke Uzbekistan,” jelas Sodik.

Selain itu, lanjut Sodik, dibahas soal kerja sama peranan perempuan karena di Uzbekistan memiliki program yang sama dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dan tak kalah menarik, dibahas soal turisme halal, dimana Uzbekistan punya potensi yang tidak kalah dengan



Foto : Andri/hr

Komisi IX Sepakat Bentuk Panja SKM

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menjelaskan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berlangsung secara tertutup, bersepakat membentuk Panja yang akan mengklarifikasi fakta tentang kandungan yang ada dalam susu kental manis (SKM).

“Kita ingin melakukan klarifikasi, karena itu kesepakatan rapat tadi membentuk panja SKM,” ujar Ermalena, di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/7).

Politisi PPP itu mengungkapkan, polemik tentang SKM perlu ditelusuri secara mendalam, karena diduga masih ada kesalahan tafsir atas pengonsumsian SKM yang melibatkan anak-anak.

“Ini kan menyangkut anak-anak, kalau anak-anak banyak mengonsumsi susu kental manis yang mengandung susu ataupun tidak mengandung susu ini kan untuk tumbuh kembang anak ke depan bahaya,” ungkap Ermalena.

Usai dibentuk, Panja SKM akan segera memanggil pihak terkait yang terlibat dalam polemik SKM ini. Termasuk memanggil industri yang memproduksi SKM.

“Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait. Termasuk industrinya kita akan panggil. Kita sudah minta BPOM segera memberikan list-nya kepada kita. Karena ini kan tanggung jawab kita supaya masyarakat tidak bingung,” jelas Ermalena.

Menurutnya, Komisi IX DPR RI memberikan atensi yang cukup serius tentang kasus SKM. Meskipun terkesan sederhana, namun jika kasus ini tidak ditangani secara benar bisa berbahaya bagi konsumen.

Dan jika nanti dalam penelusuran panja ditemukan permasalahan yang serius, bukan tidak mungkin produk SKM akan ditarik dari peredaran. Namun, menurut Ermalena sejauh ini belum ada alasan untuk memberhentikan atau menarik produk SKM.

“Belum ada. Ini kan karena masih simpang pendapat. Kalau memang nanti di Panja ditemukan masalah yang serius, bisa saja itu terjadi. Karena yang penting sekarang masyarakat aman, berhak untuk mendapatkan yang terbaik,” papar Ermalena. ■ eko/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena

Foto : Rizka/hr

Timur Tengah seperti Yordania, Mesir dan Maroko, meski negara itu belum menjadi destinasi yang utama bagi para peziarah muslim Indonesia.

“Kita akan bangun kerja sama sehingga secara timbal balik nanti akan banyak turis Uzbekistan datang ke Indonesia dan banyak turis Indonesia yang berkunjung ke Uzbekistan,” jelas politisi dapil Jawa Barat itu.

Negara kelahiran tokoh hadis Imam Al-Bukhori ini, kata Sodik, memiliki sejarah dimana Bung Karno meminta kepada Pemerintah Uni Soviet saat itu, untuk melakukan rekonstruksi terhadap makam Imam Al-Bukhori. Karena itu Pemerintah Uzbekistan sangat memberi perhatian khusus kepada rakyat dan Bangsa Indonesia. ■ mp/sf



Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin

Foto: Jayadi/hr

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan isu terkait ketahanan pangan, pertahanan dan nilai tukar rupiah hingga pemilu masih menjadi pendalaman. “Kita melakukan pembahasan asumsi yang terjadi saat ini misalnya, masalah ketahanan pangan, penyelenggaraan pemilu dan nilai tukar rupiah,” ungkap Azis di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (04/7).

Pemerintah mengusulkan anggaran belanja kementerian/ lembaga pada tahun 2019 sebesar Rp838,6 triliun atau turun sedikit dibandingkan dengan pagu indikatif di 2018 yang sebesar Rp847,4 triliun.

Sektor-sektor tersebut, lanjut Azis, sangat penting untuk dipahami secara mendalam. Terlebih pada 2019, Indonesia akan menyelenggarakan Pilpres dan Pileg secara bersamaan. Khususnya anggaran Pemilu harus jadi perhatian untuk mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Azis menuturkan hal ini penting demi terselenggaranya pemilu yang lebih berkualitas.

Sebelumnya disampaikan, pemerintah mengusulkan anggaran belanja kementerian/ lembaga pada tahun 2019

Bahas RAPBN 2019, DPR Terus Kaji Besaran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terus melakukan pendalaman terkait RAPBN 2019. Sejumlah isu menjadi pembahasan penting dalam rangka peningkatan pos anggaran di sejumlah sektor. Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin menyatakan, dalam pembahasan menuju APBN 2019, beberapa sektor masih menjadi fokus pemerintah dengan DPR.

sebesar Rp838,6 triliun atau turun sedikit dibandingkan dengan pagu indikatif di 2018 yang sebesar Rp847,4 triliun.

Dari angka tersebut, dilaporkan terdapat sejumlah K/L mengajukan pagu indikatif terbesar di RAPBN 2019 yakni Kementerian Pertahanan sebesar Rp106,1 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp102,0 triliun, Polri sebesar Rp76,9 triliun, dan

Kementerian Agama sebesar Rp63,0 triliun.

Kemudian, Kementerian Kesehatan sebesar Rp60,1 triliun, Kementerian Sosial sebesar Rp59,3 triliun, Kementerian Keuangan sebesar Rp46,3 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp44,1 triliun, Kemenristekdikti sebesar Rp42,3 triliun dan Kemendikbud sebesar Rp39,2 triliun. ■ hs/sf

Peremajaan Kelapa Sawit di Sumut Terkendala Biaya

Ekspor kelapa sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Sumatera Utara, dengan rata-rata nilai ekspor 4 miliar dolar AS per tahun dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Sehingga, bagi Sumut, kelapa sawit memiliki nilai tersendiri dalam mendukung pembangunan nasional.

Hal itu menjadi temuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan saat mengunjungi lahan perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan didampingi perwakilan Kementerian Keuangan RI & Asosiasi Kelapa Sawit, Jumat (06/7).

“Meskipun program peremajaan kelapa sawit ini sudah di-*launching* oleh Presiden pada November 2017, ternyata setelah kita tinjau di lapangan program ini tidak jalan. Hal ini disebabkan

ketidaksinkronan regulasi yang dibuat. Salah satunya adalah dana peremajaan kelapa sawit sebesar Rp25 juta harus didampingi dana lanjutan perbankan,” tutur Marwan.

Dalam pertemuan yang digelar perkebunan kelapa sawit itu, Marwan berharap para petani untuk melengkapi syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana lanjutan perbankan, sehingga dana untuk peremajaan sawit dapat segera diterima oleh petani.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti keluhan petani yang terkendala dengan dana yang tidak



Pesantren Kelak Seajar dengan Lembaga Pendidikan Umum

Lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya diharapkan kelak bisa disejajarkan dengan lembaga pendidikan umum, seperti SMP dan SMA. DPR RI sedang merumuskan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) yang kini sedang diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas

Foto: Azka/hr

Demikian terungkap saat Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menerima Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah (FKPM) di ruang rapat Baleg, Senayan, Jakarta, Kamis (05/7). "Dengan adanya RUU LPKP kelak lembaga pendidikan pesantren akan semakin kokoh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Supratman saat membuka pertemuan.

FKPM sangat mengapresiasi semua pihak termasuk DPR yang menginisiasi lahirnya RUU ini. Dunia pesantren akan

mendapat pengakuan luas dan sejajar dengan dunia pendidikan lainnya. Para lulusan pesantren juga kelak bisa diterima di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri. Selama ini, menurut delegasi FKPM, ijazah lulusan pesantren belum diterima di perguruan tinggi.

Pondok Pesantren Gontor saja yang sudah begitu lama berdiri, baru diakui dan diterima di berbagai universitas pada tahun 2000. Ironisnya, masih menurut FKPM, perguruan tinggi di luar negeri malah bisa mengakui dan menerima para

jabolan pesantren. Sebut saja negara-negara yang mengakui lulusan pesantren Indonesia adalah Mesir, Sudan, Yaman, dan lain-lain. Saat ini ada sekitar 27 ribu pesantren di Indonesia. Tentu dengan jumlah itu butuh regulasi setingkat UU yang memberi perlakuan khusus terhadap pesantren. ■mh/sc



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan

Foto: Azka/hr

sesuai untuk penggarapan satu hektar lahan yang hanya sebesar Rp25 juta. Padahal untuk satu hektar peremajaan sawit dibutuhkan dana Rp65 juta. Sehingga untuk kebutuhan dana lanjutan itu, dibutuhkan kenaikan platform dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta.

"Petani akan dipermudah jika platform-nya dinaikkan dari Rp25

juta ke Rp35 juta, sehingga nilai yang akan dipinjam petani ke perbankan tidak terlalu besar yang bisa masuk ke kredit mikro, tanpa harus dengan jaminan," tutur politisi dapil Lampung itu.

Selain dana yang dinilai kurang, Tim Kunker Komisi XI DPR RI juga menemui keluhan dari petani yang kesulitan melengkapi persyaratan dari perbankan,

salah satunya NPWP, sebagai syarat yang harus dimiliki petani dalam pengajuan pinjaman.

"Kendala saat ini para petani masih belum bisa melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh pihak bank, antara lain petani tidak mau membuat NPWP yang dinilai rumit dan harus lapor SPT Tahunan," tutur Marwan.

Menanggapi keluhan dari para petani itu, Kepala Pajak Kanwil Sumatera Utara, Mochtar berpendapat bahwa dari Kanwil Pajak Sumut sudah memberikan edukasi bagi para petani dalam proses pembuatan NPWP dan laporan SPT Tahunan.

"Kami dari kantor pajak setiap minggu selalu memberikan bimbingan ke masyarakat dalam pembuatan NPWP. Dari keseluruhan di Sumut ini tidak ada masalah mengenai NPWP, dan hanya segelintir masyarakat saja yang belum punya NPWP," tutur Mochtar. ■ rh/sf

Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit Harus Didistribusikan Merata

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Riau Sarmuji menilai, kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah cukup baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Meski demikian, ke depannya tetap harus dievaluasi. Mengingat ia menerima keluhan seperti prosedur yang masih rumit, sehingga menghambat realisasi pencairan dana dari BPDPKS.

Selain itu, Komisi XI DPR RI juga menerima keluhan seperti tidak seimbang antara dana bagi hasil dengan resiko yang diakibatkan seperti rusaknya infrastruktur jalan di Provinsi Riau. Terhadap keluhan tersebut, Komisi XI DPR RI akan menindaklanjutinya, dan mencari solusi bersama pemerintah pusat.

“Tadi saya sudah dengar bahwa BPDPKS ini sangat penting dan dirasakan manfaatnya. Tapi tetap masih



Foto: Hendra/hr

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Sarmuji

ada keluhannya seperti prosedur yang masih rumit dan itu menghambat realisasi pencairan dana dari BPDPKS.

Selain itu juga akibat yang ditimbulkan dari banyaknya sawit di Riau itu terjadi kerusakan infrastruktur jalan,” ujar

Pemerintah Harus Cermati Maraknya SKTM Fiktif

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, maraknya keberadaan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) fiktif yang terjadi di sejumlah daerah untuk keperluan mendaftar sekolah, harus dicermati secara serius oleh pemerintah, pihak sekolah dan aparat penegak hukum.

“Keberadaan SKTM fiktif ini telah melibatkan pihak orang tua, calon peserta anak didik serta pihak aparat pemerintah yang mengeluarkan surat tersebut. Penggunaan mekanisme jalur hukum patut dipertimbangkan, mengingat masifnya praktik pembuatan SKTM fiktif ini. Jelas praktik ini melanggar etika, norma dan hukum yang berlaku,”

ucap Reni dalam berita rilisnya kepada Parlemen, Senin (09/7).

Politisi PPP itu meminta agar pemerintah dan lembaga pengelola pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, membuat suatu sistem yang memungkinkan agar tidak ada lagi praktik penggunaan SKTM fiktif. Misalnya, dibuatkan aturan bagi siapa saja yang

sengaja membuat SKTM fiktif, maka calon peserta didik atau calon mahasiswa akan dianulir hasil test-nya atau seleksi masuk di sekolah atau perguruan tinggi tersebut.

“Praktik pembuatan SKTM fiktif ini telah merusak mental dan nalar para calon peserta didik. Praktik ini harus menjadi perhatian serius agar ke depan, tidak ada lagi praktik pembuatan SKTM fiktif yang jelas merugikan yang lainnya,” tandasnya.

Reni menyatakan bahwa DPR akan mempertanyakan secara khusus atas praktik SKTM fiktif ini kepada pemerintah dengan harapan celah atas praktik tersebut dapat ditutup di waktu-waktu mendatang.

“Di samping itu, DPR juga akan mendorong pemerintah agar membuat sistem yang kukuh agar persoalan tersebut tidak muncul kembali,” pungkas politisi dapil Jawa Barat itu. ■ dep/sf

Sarmuji usai pertemuan antara Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan Wakil Gubernur Riau, di Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat, (06/7).

Sarmuji menilai, berdasarkan temuan yang didapat, dana keuntungan dari perkelasawitan itu tidak dinikmati oleh daerah. Ini yang menyebabkan banyak daerah yang keberatan, karena daerah mengalami risiko akibat rusaknya jalan yang dilalui kendaraan besar yang mengangkut kelapa sawit.

“Berdasarkan yang kami peroleh, daerah banyak yang keberatan. Banyak infrastruktur jalan rusak. Sedangkan ada dana bagi hasil yang dihasilkan dari kelapa sawit itu tidak adil dan kita akan tindaklanjuti temuan ini,” tutur Sarmuji.

Politisi Partai Golkar ini mendukung daerah penghasil kelapa sawit untuk menyampaikan aspirasinya dan memenuhi haknya untuk dana bagi hasil ini.

“Kami mendukung tiap kepala daerah untuk menyampaikan aspirasinya guna memperoleh hak dana bagi hasil yang adil bagi tiap daerah. Tak hanya kelapa sawit, di sektor lain daerah juga dapat dana bagi hasil daerah seperti sektor pertembakauan,” tutup Sarmuji. ■ hs/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati

Foto : Sofyan/hr

Pengelolaan Dana BDPDKS Harus Transparan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir meminta agar tata kelola dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berjalan secara transparan. Mengingat dana tersebut merupakan dana himpunan dari masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

“Tentu ini harus dilaporkan. Jangan sampai rakyat menilai, mereka sudah memberikan kontribusi, tapi mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa,” tegas Hafisz saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), GAPKI, serta petani Kelapa Sawit, di Palembang, Sumsel, Kamis (06/7).

Politisi PAN itu mengatakan, saat ini dalam hal verifikasi data masih terbilang samar pihak mana saja yang diberikan. “Seperti yang kita ketahui, BPDPKS ini kan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Artinya lembaga tersebut harus mengutamakan *good government* terutama dalam hal pelaksanaannya,” jelasnya.

Hafisz turut menyayangkan dari ribuan pelaku usaha kelapa sawit hanya ada sebelas perusahaan yang menerima dana. Padahal, masih banyak ribuan pengusaha yang lebih sulit menjalankan usahanya. Maka dari itu, pihaknya meminta adanya keadilan.

“Sebaiknya BPDPKS jangan hanya memperhatikan perusahaan-perusahaan, tapi harus juga memperhatikan rakyat yang hanya menjual CPO dan menjadi tulang punggung keluarga,” jelas politisi dapil Sumsel itu.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Kemitraan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tulus Budhianto menyampaikan penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) dilakukan melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan.

“Untuk melaksanakan penyaluran dana tersebut, harus dibuat terlebih dahulu kerja sama antara tiga pihak diantaranya BPDPKS, Kelembagaan Pekebun dan Lembaga Keuangan Perbankan,” ungkap Tulus. ■ tra/sf



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir

Untuk menjamin peremajaan dapat terlaksana sesuai standar teknis dan produktivitas sesuai potensi, maka dilakukan pembinaan, pengawalan, pengawasan dan *monitoring* serta evaluasi. Seluruhnya dilakukan oleh dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan provinsi, Direktorat Jenderal Perkebunan. “BPDPKS melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penggunaan dana PPKS tersebut,” imbuh Tulus.

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini turut diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi XI, diantaranya, Hendrawan Supratikno, Indah Kurnia, dan Eva Kusuma Sundari dari F-PDI Perjuangan, Tutik Kusuma Wardani dan Nurhayati Ali Assegaf dari F-PD, dan Mukhamad Misbakhun (F-PG).

Kemudian, Willgo Zainar dari Sumail Abdullah (F-Gerindra), Jon Erizal (F-PAN), Fathan (F-PKB), Refrizal, Junaidi Auly (F-PKS), Amir Uskara dan Elviana dari F-PPP, dan Johny G. Plate (F-Nasdem).

■ tra/sf



Suasana pelantikan sejumlah Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Pejabat Baru Setjen dan BK DPR Didorong Tingkatkan Kinerja

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi melantik sejumlah Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Indra mengatakan, prosesi pelantikan dan mutasi jajaran pejabat ini adalah bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai dan kelembagaan.

“Khusus untuk pejabat yang dilantik hari ini saya berpesan agar dapat meningkatkan kapasitas sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dan integritas,” demikian disampaikan Indra dalam sambutan di acara pelantikan tersebut di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/7).

Indra juga meminta agar 29 pejabat struktural dan 3 fungsional yang baru saja dilantik untuk berpegang teguh pada kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN)

yakni disiplin, hierarki, loyalitas dan selalu bekerja dengan berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Sebagai pelaksana pengawasan kebijakan publik dan pelayanan publik yang bebas dari unsur politik, ASN memiliki peran penting sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk itu, Indra mengajak pejabat yang baru saja dilantik untuk bergerak cepat mewujudkan berbagai program reformasi birokrasi di berbagai area, dan kegiatan lintas

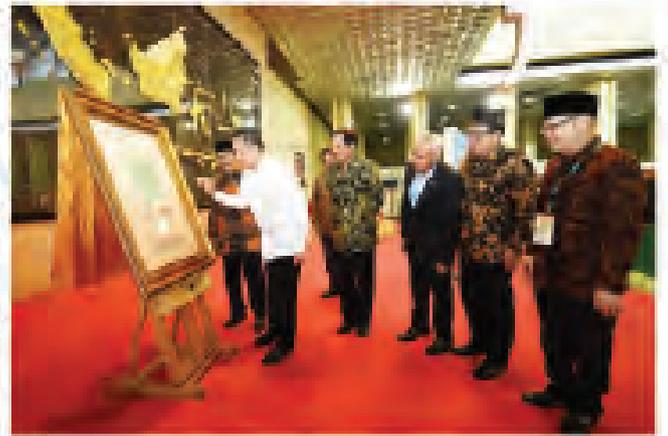
unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, untuk meningkatkan dukungan kepada DPR RI keseluruhan.

“Saya percaya, dengan potensi yang dimiliki disertai kerja keras kita semua, perubahan itu secepatnya dapat kita capai,” kata Indra dengan nada penuh keyakinan.

Seperti pada pelantikan-pelantikan pejabat sebelumnya, Indra menekankan agar promosi jabatan yang baru saja diterima tidak berlarut-larut dalam euforia, sebab tugas dan tanggung jawab yang lebih berat sudah menanti, seperti menyusun program kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja, dengan berpedoman pada norma, standar, dan mekanisme kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Indra juga menyampaikan bahwa saat ini ia melakukan koordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Pusdiklat untuk menyusun program yang menyangkut peningkatan kompetensi pegawai, agar pegawai Setjen dan BK DPR RI menjadi pegawai yang akuntabel, profesional, dan berintegritas, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik. ■

apr/sf



Ketua DPR Bambang Soesatyo membuka secara resmi pameran lukisan yang bertajuk "Wajah Seni Lukis Islam Indonesia" yang diselenggarakan oleh DPR RI dan ICMI di Gedung DPR, Senin (9/7). Foto: Ocha



Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan sejumlah mitra kerjanya terkait revisi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS-KOKR) di Gedung DPR, Rabu (11/7). Foto: Ocha



Rapat Paripurna DPR RI pembahasan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RLU Karantina Kesehatan dan RUU kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah RI dan Republik Korea, Selasa (10/7). Foto: Anon



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mau motor
Zaman now?

IKUTI LOMBA
KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY
MEME (gambar, karikatur, video)
ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:
19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,
Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE:

SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)